

***THE INFLUENCE OF POLITICAL CONSCIOUSNESS TOWARD
POLITICAL PARTICIPATION IN ELECTION MAYOR IN THE
TENAYAN RAYA DISTRICT, REGENCY PEKANBARU 2017***

Mernasusanti¹, Sri Erlinda², Gimin³

Email : mernasusanti95@gmail.com¹, linda_sri70@yahoo.com², gim_ur@yahoo.co.id³

No.Hp : 085356339351

*Pancasila and Citizenship Education
Faculty of Teacher Training and Education
University of Riau*

Abstract: *One manifestation of political consciousness is political participation in the election of the mayor. Political participation based on political consciousness will encourage people to exercise their right to vote rationally and in accordance with the aspirations of the people. But in reality, the level of voter participation in the election mayor of Pekanbaru in 2017 is still lacking. Percentage of voters' participation in sub district Tenayan Raya only reached 43.72%, which means there are still many voters who did not participate that reached 56.28%. This study aims to explain the effect of political awareness on political participation. This study uses quantitative descriptive by spreading questionnaires to 100 respondents in four urban villages in Tenayan Raya sub district, then the data is analyzed by using logistic regression. Based on the result of research, it can be concluded that there is a significant influence between political awareness on political participation because the value of p value Chi-Square 13,105 > Chi-Square table 3,841. In the Pseudo R Square table of 16.4% political awareness contribution to political participation, in other words 83.6% other factors from outside the model that explain the dependent variable. Based on the analysis of political awareness data of Tenayan Raya sub-district is low down to 68%, while the political participation of Tenayan Raya community in the election of mayor of Pekanbaru is also categorized as low by 94%.*

Keywords: *Political Awareness, Political Participation*

**PENGARUH KESADARAN POLITIK TERHADAP PARTISIPASI
POLITIK MASYARAKAT KECAMATAN TENAYAN RAYA
DALAM PEMILIHAN UMUM WALIKOTA
PEKANBARU TAHUN 2017**

Mernasusanti¹, Sri Erlinda², Gimin³
Email : mernasusanti95gmail.com¹, linda_sri70@yahoo.com², gim_ur@yahoo.co.id³
No.Hp : 085356339351

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan
Universitas Riau

Abstrak: Salah satu wujud dari kesadaran politik adalah partisipasi politik dalam pemilihan walikota. Partisipasi politik yang dilandasi oleh kesadaran politik akan mendorong masyarakat menggunakan hak pilihnya secara rasional dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Namun kenyataannya, tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan walikota Pekanbaru tahun 2017 masih kurang. Persentase partisipasi pemilih masyarakat kecamatan Tenayan Raya hanya mencapai 43,72%, yang berarti masih banyak pemilih yang tidak berpartisipasi yakni mencapai 56,28%. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh kesadaran politik terhadap partisipasi politik. Penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner ke 100 responden pada empat kelurahan di kecamatan Tenayan Raya, kemudian data di analisis dengan menggunakan regresi logistik. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kesadaran politik terhadap partisipasi politik karena nilai p value Chi-Square $13,105 > \text{Chi-Square tabel } 3,841$. Pada tabel *Pseudo R Square* sebesar 16,4% sumbangan kesadaran politik terhadap partisipasi politik, dengan kata lain sebesar 83,6% faktor lain dari luar model yang menjelaskan variabel dependen. Berdasarkan hasil penelitian kesadaran politik masyarakat kecamatan Tenayan Raya tergolong rendah ke bawah yaitu sebesar 68%, sedangkan partisipasi politik masyarakat kecamatan Tenayan Raya dalam pemilihan walikota Pekanbaru juga tergolong kategori rendah yaitu sebesar 94%.

Kata Kunci: Kesadaran Politik, Partisipasi Politik

PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan salah satu tonggak penting yang merepresentasikan kedaulatan rakyat, pemilihan umum sebagai sarana demokrasi telah digunakan disebagian besar negara di dunia termasuk Indonesia. Dalam pemilu, rakyat memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di parlemen dan memilih pemimpin di semua tingkatan tatanan politik, mulai dari pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah (Gubernur dan wali kota serta bupati) hingga pemilihan kepala desa.

Moment pilkada (pemilihan wali kota) ini dijadikan tolok ukur menilai partisipasi masyarakat. Kesadaran yang dibentuk melalui pilkada merupakan salah satu pendukung partisipasi politik, selain daripada budaya politik dan pendidikan politik. Kesadaran politik akan memunculkan peran aktif masyarakat dalam meningkatkan mutu kehidupan dengan melakukan pengawasan ketat atas kebijakan penguasa. Politik adalah pengaturan urusan masyarakat melalui kekuasaan. Kekuasaan diperoleh dari rakyat melalui pemilihan. Ini berarti yang akan menduduki tampuk kekuasaan ditentukan oleh masyarakat. Selain itu, masyarakat juga merupakan lahan tempat lahirnya para pemimpin.

Berdasarkan data dari KPU kota Pekanbaru tahun 2017 tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan umum di kota Pekanbaru, masyarakat kecamatan Tenayan Raya merupakan pemilih terbanyak dalam pemilihan wali kota Pekanbaru sebesar 98.517 orang dan merupakan kecamatan dengan persentase partisipasi terendah yaitu 43,72% atau sebanyak 43.073 masyarakat kecamatan Tenayan Raya yang berpartisipasi, dengan kata lain lebih dari setengah pemilih yang memilih untuk golput atau tidak berpartisipasi dalam pesta demokrasi kota pekanbaru tahun 2017 padahal Pemilihan wali kota merupakan salah satu bentuk pemilu yang dilakukan untuk memilih pejabat atau elite lokal di daerah itu sendiri yang lebih mengetahui dan berpengaruh terhadap daerah itu sendiri.

Rush dan Althop (2000: 123) berpendapat tentang partisipasi politik yakni keterlibatan individu sampai pada bermacam-macam tingkatan di dalam sistem politik. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan partisipasi politik, seperti pemilihan umum, penyampaian pendapat, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta partisipasi melalui masyarakat di lingkungan keluarga dan kemasyarakatan. Partisipasi dilakukan menurut kemampuan, kesiapan, dan kesempatan masing-masing. Setiap warga negara perlu mempersiapkan diri agar mampu berpartisipasi aktif dalam sistem politik yang ada. Partisipasi politik bukanlah dominasi setiap warga negara. Partisipasi politik berhaluan kepada kehendak untuk memengaruhi pemerintah yang sedang berkuasa.

Ciri-ciri kesadaran politik menurut (Almond & Verba, 1984:55) yang menyatakan kesadaran politik seseorang dapat diukur melalui orientasi politik. Orientasi politik tersebut dibagi menjadi tiga yaitu Orientasi kognitif, orientasi afektif, dan orientasi evaluatif. Sedangkan menurut Surbakti (1992:144) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kesadaran politik ialah kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara. Hal ini menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat ia hidup. Berdasarkan pengertian dari kesadaran politik yang dipaparkan oleh Surbakti (1992:144), dapat dijabarkan ciri-ciri dari kesadaran politik sebagai berikut: Mengerti akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, Berperan menyangkut pengetahuan dalam lingkungan masyarakat dan politik, Mempunyai minat dan perhatian

sebagai warga negara terhadap lingkungan masyarakat dan politik adalah mengerti akan hak dan kewajiban sebagai warga negara (orientasi kognitif), berperan menyangkut pengetahuan dalam lingkungan masyarakat dan politik (orientasi afektif), mempunyai minat dan perhatian sebagai warga negara terhadap lingkungan masyarakat dan politik (orientasi evaluatif).

Menurut Huntington dan Nelson (1994: 16-17) menemukan bentuk-bentuk partisipasi politik yang berbeda, yaitu:

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Kegiatan pemilihan; | 4. Mencari koneksi (<i>contacting</i>); |
| 2. <i>Lobbying</i> ; | 5. Tindak kekerasan (<i>violence</i>). |
| 3. Kegiatan organisasi; | |

Dalam penelitian ini, salah satu bentuk partisipasi politik yang digunakan adalah kegiatan pemilihan atau dalam hal ini adalah kegiatan pilkada (Pemilihan wali kota) tahun 2017. Kegiatan adalah aktivitas, usaha, dan pekerjaan. Dimana menurut Huntington dan Nelson (1994), kegiatan pemilihan mencakup suara, juga sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon, atau setiap tindakan yang bertujuan memengaruhi hasil proses pemilihan. *Lobbying* mencakup upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin politik dengan maksud untuk mempengaruhi keputusan tentang persoalan yang telah menyangkut sejumlah besar. Kegiatan organisasi menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi yang tujuannya yang utama dan eksplisit adalah dengan mempengaruhi pengambilan keputusan orang. Mencari koneksi merupakan tindakan perorangan yang akan ditujukan terhadap pejabat pemerintah dan dengan memperoleh manfaat bagi hanya satu orang atau segelintir orang. Sedangkan tindakan kekerasan merupakan salah satu bentuk dari partisipasi politik untuk keperluan analisis ada manfaatnya untuk mendefenisikannya sebagai bentuk kategori tersendiri dengan sebagai upaya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dari pemerintah dengan jalan menimbulkan kerugian fisik terhadap orang ataupun harta benda.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kesadaran politik masyarakat kecamatan Tenayan Raya?
2. Bagaimana partisipasi politik masyarakat kecamatan Tenayan Raya dalam Pemilihan wali kota Pekanbaru tahun 2017?
3. Apakah ada pengaruh kesadaran politik terhadap partisipasi politik masyarakat kecamatan Tenayan Raya dalam Pemilihan wali kota Pekanbaru tahun 2017?

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui bagaimana kesadaran politik masyarakat kecamatan Tenayan Raya.

Untuk mengetahui bagaimana partisipasi politik masyarakat kecamatan Tenayan Raya dalam pemilihan umum wali kota Pekanbaru tahun 2017.

Untuk mengetahui apakah ada pengaruh kesadaran politik terhadap partisipasi politik masyarakat kecamatan Tenayan Raya dalam Pemilihan wali kota Pekanbaru tahun 2017.

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini masyarakat kecamatan Tenayan Raya yang termasuk kedalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang berjumlah 98.517 orang. Untuk menentukan jumlah sampel yang akan diteliti, maka penelitian ini menggunakan teknik *random sampling*, yaitu agar setiap *sample* populasi dapat memiliki kesempatan atau peluang yang sama. Untuk menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini, digunakan rumus Teknik Solvin. Pengambilan sampel untuk populasi yang sudah diketahui menurut Siregar (2013: 34) adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{N \cdot d^2 + 1}$$

Keterangan:

n: Banyaknya sampel
 N: Jumlah populasi
 d: Tarif nyata (0,10)

Maka dengan menggunakan rumus tersebut banyaknya sampel adalah:

$$n = \frac{98.517}{98.517 \cdot (0,10)^2 + 1} = 99,89 \text{ di bulatkan menjadi } 100 \text{ orang}$$

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan *random sampling*, yang memberikan kesempatan sama kepada setiap masyarakat untuk di jadikan sampel, yang di ambil sebanding dengan banyaknya sub mata pilih di setiap kelurahan dengan rumus:

$$Nh = \frac{Ni}{N} \times n$$

Keterangan:

Nh : Banyaknya sampel dari setiap kelompok
 n : Jumlah sampel yang mewakili populasi
 Ni : Jumlah populasi masing-masing kelurahan
 N : Jumlah populasi

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner, wawancara dan dokumentasi digunakan untuk memperoleh data mengenai pengaruh kesadaran politik terhadap partisipasi politik masyarakat kecamatan Tenayan Raya dalam pemilihan umum walikota Pekanbaru tahun 2017. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini

menggunakan skala *linkert* untuk variabel kesadaran politik dan skala *guttman* untuk variabel partisipasi politik. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dan data di analisis dengan menggunakan regresi logistik. Untuk menentukan besar persentase alternatif jawaban responden dengan menggunakan teknik analisis data sebagai berikut :

1. Analisis Deskriptif

Untuk menentukan besar persentase alternatif jawaban, menggunakan rumus sebagai berikut (Sudjana, 2001: 40) :

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

- P : Besar alternatif jawaban
 F : Frekuensi alternatif
 N : Jumlah sampel Penelitian
 100% : Bilangan tetap

2. Analisis Regresi Logistik

Untuk menguji hipotesis melalui analisis regresi logistik menggunakan pengujian *Maximum likelihood* (Uji Chi-Square) dan *Pseudo R Square*. maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

- a) Jika $\text{Chi-Square}_{\text{hitung}} > \text{Chi-Square}_{\text{tabel}}$ maka H_0 ditolak. Hal ini berarti bahwa ada pengaruh signifikan antara kesadaran politik terhadap partisipasi politik.
- b) Jika $\text{Chi-Square}_{\text{tabel}} > \text{Chi-Square}_{\text{hitung}}$ maka H_1 diterima. Hal ini berarti bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara kesadaran politik terhadap partisipasi politik .

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut ini adalah hasil dan pembahasan mengenai pengaruh kesadaran politik terhadap partisipasi politik masyarakat kecamatan Tenayan Raya dalam pemilihan umum walikota Pekanbaru tahun 2017, adapun hasil dan pembahasannya adalah sebagai berikut.

A. Analisis Deskriptif Kesadaran Politik (X)

Menurut Budiardjo (2008:369) tingkat kesadaran politik diartikan sebagai tanda bahwa warga masyarakat menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan dan atau pembangunan dan partisipasi politik erat sekali kaitannya dengan kesadaran politik,

karena semakin sadar bahwa dirinya diperintah, orang kemudian menuntut diberikan hak bersuara dalam penyelenggaraan pemerintah .

kesadaran politik dalam penelitian ini di dukung oleh 3 indikator, yaitu dengan hasil sebagai berikut:

1. Mengerti hak dan kewajiban warga negara (Orientasi Kognitif)

Mengerti akan hak dan kewajiban sebagai warga negara (orientasi kognitif) yaitu hak dan kewajiban yang harus dimengerti adalah, jika mempunyai hak atas kebebasan, maka akan mempunyai kewajiban untuk menghormati kebebasan orang lain. Jika warga Negara mempunyai hak untuk berpartisipasi dan berinteraksi dalam proses politik, maka ia akan mempunyai kewajiban berpartisipasi dan berusaha agar pemimpin-pemimpin yang terbaiklah yang akan terpilih (Budiardjo,2008:230). Hasil penelitian dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1 Mengerti hak dan kewajiban warga negara (Orientasi Kognitif)

No	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Tinggi	77	77%
2	Tinggi	21	21%
3	Sedang	1	1%
4	Rendah	0	0%
5	Sangat Rendah	1	1%
Jumlah		100	100%

Sumber: Data Olahan 2017

Berdasarkan tabel 1 mengerti hak dan kewajiban warga negara, dapat dilihat bahwa pada umumnya (77 masyarakat atau 77%) mengerti hak dan kewajiban warga negara yang sangat tinggi, bahkan 21 masyarakat (21%) mengerti hak dan kewajiban warga negara yang tinggi. Ini berarti 98% masyarakat mengerti hak dan kewajiban warga negara.

2. Berperan menyangkut pengetahuan dalam lingkungan masyarakat dan politik (Orientasi Afektif)

Berperan menyangkut pengetahuan dalam lingkungan masyarakat dan politik (orientasi afektif) yaitu ikut berperan serta yang menyangkut pengetahuan dalam lingkungan masyarakat dan politik berarti mendapatkan informasi yang menjadi pengetahuan, serta memberikan penilaian sebagai seorang warga negara terhadap suatu bentuk kinerja pemerintah (sistem politik) dalam pembuatan keputusan dan kebijakan umum. Penilaian suatu bentuk kinerja pemerintah (sistem politik) adalah penilaian seseorang terhadap pemerintah: apakah ia menilai pemerintah dapat dipercaya dan dapat dipengaruhi atau tidak. Hasil penelitian dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2 Berperan menyangkut pengetahuan dalam lingkungan masyarakat dan politik (Orientasi Afektif)

No	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Tinggi	8	8%
2	Tinggi	9	9%
3	Sedang	11	11%
4	Rendah	18	18%
5	Sangat Rendah	54	54%
Jumlah		100	100%

Sumber: Data Olahan 2017

Berdasarkan tabel 2 Berperan menyangkut pengetahuan dalam lingkungan masyarakat dan politik (Orientasi Afektif), dapat dilihat bahwa pada umumnya 54 masyarakat (54%) memiliki pengetahuan dalam lingkungan masyarakat dan politik yang sangat rendah, bahkan 18 masyarakat (18%) memiliki pengetahuan dalam lingkungan masyarakat dan politik yang rendah. Ini berarti 72% masyarakat memiliki pengetahuan dalam lingkungan masyarakat dan politik yang sangat rendah.

3. Mempunyai Minat dan perhatian sebagai warga negara terhadap lingkungan masyarakat dan politik (Orientasi Evaluatif)

Minat dan perhatian warga negara merupakan serangkaian kegiatan yang diperlukan untuk kepentingan bersama dalam berbangsa dan bernegara. Sanit (2012:108) mengatakan bahwa keikutsertaan masyarakat luas bukan hanya dalam mengawasi kinerja aparat pemerintahan seperti birokrasi pemerintahan, jika berbicara mengenai pembangunan negara dibutuhkan keterlibatan seluruh masyarakat sebagai sistem. Hasil penelitian dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini:

Tabel 3 Mempunyai minat dan perhatian sebagai warga negara terhadap lingkungan masyarakat dan politik (Orientasi Evaluatif)

No	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Tinggi	1	1%
2	Tinggi	2	2%
3	Sedang	6	6%
4	Rendah	12	12%
5	Sangat Rendah	79	79%
Jumlah		100	100%

Sumber: Data Olahan 2017

Berdasarkan tabel 3 mempunyai minat dan perhatian sebagai warga negara terhadap lingkungan masyarakat dan politik (Orientasi Evaluatif), dapat dilihat bahwa pada umumnya 79 masyarakat (79%) mempunyai minat dan perhatian sebagai warga negara terhadap lingkungan masyarakat dan politik yang sangat rendah, bahkan 12 masyarakat (12%) mempunyai minat dan perhatian sebagai warga negara terhadap lingkungan masyarakat dan politik yang rendah. Ini berarti 91% masyarakat mempunyai minat dan perhatian sebagai warga negara terhadap lingkungan masyarakat dan politik yang sangat rendah.

Tabel 4 Distribusi Frekuensi Kesadaran Politik Masyarakat Kecamatan Tenayan Raya Dalam Pemilihan Wali Kota Pekanbaru Tahun 2017

No	Kategori	Klasifikasi	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Tinggi	>51 – 60	3	3%
2	Tinggi	>42 – 51	10	10%
3	Sedang	>33 – 42	19	19%
4	Rendah	>24 – 33	60	60%
5	Sangat Rendah	15 – 24	8	8%
Jumlah			100	100%

Sumber: Data Olahan 2017

Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui bahwa pada umumnya 8 masyarakat (8%) memiliki kesadaran politik yang sangat rendah, bahkan 60 masyarakat (60%) memiliki kesadaran politik yang rendah. Ini berarti sebanyak 68% masyarakat memiliki kesadaran politik yang rendah.

B. Analisis Deskriptif Partisipasi Politik (Y)

Rush dan Althop (2000: 123) berpendapat tentang partisipasi politik yakni keterlibatan individu sampai pada bermacam-macam tingkatan di dalam sistem politik. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan partisipasi politik, seperti pemilihan umum, penyampaian pendapat, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta partisipasi melalui masyarakat di lingkungan keluarga dan kemasyarakatan. Partisipasi dilakukan menurut kemampuan, kesiapan, dan kesempatan masing-masing.

Partisipasi politik dalam penelitian ini di dukung oleh 5 indikator, yaitu dengan hasil sebagai berikut:

1. Kegiatan pemilihan

Menurut Huntington dan Nelson (1994), kegiatan pemilihan mencakup suara, juga sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon, atau setiap tindakan yang bertujuan memengaruhi hasil proses pemilihan. Hasil penelitian dapat dilihat pada tabel 5 di bawah ini:

Tabel 5 kegiatan pemilihan

No	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tinggi	17	17%
2	Rendah	83	83%
Jumlah		100	100%

Sumber: Data Olahan 2017

Berdasarkan tabel 5 kegiatan pemilihan, dapat dilihat bahwa pada umumnya 83 masyarakat (83%) memilih tidak berpartisipasi dalam kegiatan pemilihan dan 17 masyarakat (17%) memilih berpartisipasi dalam kegiatan pemilihan. Berdasarkan tolak ukur pada bab III jawaban responden yang memilih iya berada pada rentang 0% – 50 % menunjukkan rendah artinya masyarakat ikut berpartisipasi dalam kegiatan pemilihan dengan persentase 17%.

2. Lobbying

Lobbying mencakup upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin politik dengan maksud untuk mempengaruhi keputusan tentang persoalan yang telah menyangkut sejumlah besar. Hasil penelitian dapat dilihat pada tabel 6 di bawah ini:

Tabel 6 *Lobbying*

No	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tinggi	2	2%
2	Rendah	98	98
	Jumlah	100	100%

Sumber: Data Olahan 2017

Berdasarkan tabel 6 *Lobbying*, dapat dilihat bahwa pada umumnya 2 masyarakat (2%) melakukan *lobbying* dan 98 masyarakat (98%) yang tidak melakukan *lobbying*. Berdasarkan tolak ukur pada bab III jawaban responden yang memilih iya berada pada rentang 0% – 50 % menunjukkan rendah artinya masyarakat yang melakukan *lobbying* dengan persentase 2%.

3. Kegiatan Organisasi

Kegiatan organisasi menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi yang tujuannya yang utama dan eksplisit adalah dengan mempengaruhi pengambilan keputusan orang. Hasil penelitian dapat dilihat pada tabel 7 di bawah ini:

Tabel 7 Kegiatan organisasi

No	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tinggi	2	2%
2	Rendah	98	98
	Jumlah	100	100%

Sumber: Data Olahan 2017

Berdasarkan tabel 7 Kegiatan organisasi, dapat dilihat bahwa pada umumnya 2 masyarakat (2%) yang melakukan kegiatan organisasi dan 98 masyarakat (98%) yang tidak melakukan kegiatan organisasi. Berdasarkan tolak ukur pada bab III jawaban responden yang memilih iya berada pada rentang 0% – 50 % menunjukkan rendah artinya masyarakat melakukan kegiatan organisasi dengan persentase 2%.

4. Mencari Koneksi

Mencari koneksi merupakan tindakan perorangan yang akan ditujukan terhadap pejabat pemerintah dan dengan memperoleh manfaat bagi hanya satu orang atau segelintir orang. Hasil penelitian dapat dilihat pada tabel 8 di bawah ini:

Tabel 8 Mencari koneksi

No	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tinggi	1	1
2	Rendah	99	99
	Jumlah	100	100%

Sumber: Data Olahan 2017

Berdasarkan tabel 8 Mencari koneksi, dapat dilihat bahwa pada umumnya 1 masyarakat (1%) masyarakat yang mencari koneksi dan 99 masyarakat (99%) yang tidak mencari koneksi. Berdasarkan tolak ukur pada bab III jawaban responden yang memilih iya berada pada rentang 0% – 50 % menunjukkan rendah artinya masyarakat yang mencari koneksi dengan persentase 1%.

5. Tindak Kekerasan

Tindakan kekerasan merupakan salah satu bentuk dari partisipasi politik untuk keperluan analisis ada manfaatnya untuk mendefenisikannya sebagai bentuk kategori tersendiri dengan sebagai upaya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dari pemerintah dengan jalan menimbulkan kerugian fisik terhadap orang ataupun harta benda. Hasil penelitian dapat dilihat pada tabel 9 di bawah ini:

Tabel 9 Tindak kekerasan

No	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tinggi	0	0
2	Rendah	100	100
	Jumlah	100	100%

Sumber: Data Olahan 2017

Berdasarkan tabel 9 Tindak kekerasan, dapat dilihat bahwa pada umumnya 100 masyarakat (100%) tidak melakukan tindakan kekerasan. Berdasarkan tolak ukur pada bab III jawaban responden yang memilih iya berada pada rentang 0% – 50 % menunjukkan rendah atau tidak ada sama sekali artinya masyarakat melakukan tindakan kekerasan dengan persentase 0%.

Tabel 10 Distribusi frekuensi partisipasi politik masyarakat kecamatan Tenayan Raya dalam pemilihan wali kota pekanbaru tahun 2017

Kategori	F	Persen
Tinggi	6	6%
rendah	94	94%
Jumlah	100	100%

Sumber: Data Olahan 2017

Berdasarkan tabel 11 dapat diketahui bahwa pada umumnya masyarakat kecamatan Tenayan Raya memiliki partisipasi politik dalam pemilihan umum wali kota

Pekanbaru yang rendah sebesar 94 % meskipun ada yang tinggi, tetapi sangat sedikit yaitu sebesar 6%.

C. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan pengujian *Maximum likelihood* (Uji Chi-Square). Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen Kesadaran Politik (X) berpengaruh terhadap variabel dependen Partisipasi Politik (Y), maka dilakukan pengujian (uji chi-square) dari selisih antara $-2 \text{ Log likelihood}$ sebelum variabel independen masuk model dan $-2 \text{ Log likelihood}$ setelah variabel independen masuk model.

Tabel 11 Omnibus Tests of Model Coefficients

		Chi-square	Df	Sig.
Step 1	Step	13.105	1	.000
	Block	13.105	1	.000
	Model	13.105	1	.000

Dari tabel 11 di atas nilai $X_{hitung} > X_{tabel}$ pada DF yaitu sebesar 3,841 atau dengan signifikansi sebesar 0,000 ($< 0,005$) atau menolak H_0 , yang menunjukkan bahwa penambahan variabel independent dapat memberikan pengaruh nyata terhadap model, atau dengan kata lain model dinyatakan fit.

Dengan demikian hipotesis yang berbunyi Jika $\text{Chi-Square}_{hitung} > \text{Chi-Square}_{tabel}$ maka H_0 ditolak. Atau yang berarti ada pengaruh signifikan antara kesadaran politik terhadap partisipasi politik (karena nilai p value Chi-Square 13,105 $>$ Chi-Square tabel 3,841).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap 100 responden di atas dapat disimpulkan bahwa kesadaran politik masyarakat kecamatan Tenayan Raya dalam pemilihan walikota Pekanbaru tahun 2017 tergolong kategori rendah yaitu sebesar 68%. Sedangkan untuk partisipasi politik masyarakat kecamatan Tenayan Raya dalam pemilihan walikota Pekanbaru tahun 2017 tergolong kategori rendah yaitu sebesar 94%. Pembuktian hipotesis digunakan untuk melihat pengaruh variabel terikat, dimana variabel bebas dalam penelitian ini adalah kesadaran politik. Selanjutnya, untuk pembuktian hipotesis apakah variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat, maka dapat dilakukan dengan analisis regresi logistik. Berdasarkan analisis regresi logistik pada proses *omnibus test* diketahui bahwa ada pengaruh signifikan antara kesadaran politik terhadap partisipasi politik (karena nilai p value Chi-Square 13,105 $>$ Chi-Square tabel 3,841).

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Berdasarkan hasil peneliti di lapangan terhadap 100 responden tentang pengaruh kesadaran politik terhadap partisipasi politik masyarakat kecamatan Tenayan Raya dalam pemilihan umum wali kota Pekanbaru tahun 2017 maka dapat di simpulkan yaitu tingkat kesadaran politik masyarakat kecamatan Tenayan Raya yang dikategorikan sangat tinggi dengan rentang >51 – 60 sebanyak 3 orang atau 3%, tinggi dengan rentang >42 – 51 sebanyak 10 orang atau 10%, sedang dengan rentang >33 – 42 sebanyak 19 orang atau 19%, rendah dengan rentang >24 – 33 sebanyak 60 orang atau 60% dan sangat rendah dengan rentang 15 – 24 sebanyak 8 orang atau 8%. Maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran politik masyarakat kecamatan Tenayan raya dalam pemilihan walikota Pekanbaru tahun 2017 tergolong rendah ke bawah dengan persentase 68%.

Tingkat partisipasi politik masyarakat kecamatan Tenayan Raya yang dikategorikan tinggi dengan rentang 51% – 100% sebanyak 6 orang atau 6% dan rendah dengan rentang 0% – 50% sebanyak 94 orang atau 94%. Maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik masyarakat kecamatan Tenayan raya dalam pemilihan walikota Pekanbaru tahun 2017 tergolong rendah dengan persentase 94%.

Berdasarkan tabel perhitungan *Pseudo R Square* yang dilakukan melalui regresi logistik diperoleh nilai *Nagelkerke R Square* sebesar 0,164 atau 16,41%. Hal ini menunjukkan variabel kesadaran politik mampu menjelaskan dan memberikan sumbangan terhadap partisipasi politik. Dari uji signifikasi regresi logistik ternyata $\text{Chi-Square}_{\text{hitung}} > \text{Chi-Square}_{\text{tabel}}$ atau $13,105 > 3,841$ maka hipotesis diterima dan H_0 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara kesadaran politik terhadap partisipasi politik.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis akan memberikan beberapa rekomendasi yang dapat memberikan manfaat, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah melalui KPU dan KPUD hendaknya membentuk tim khusus yang bertugas memberikan sosialisasi dan edukasi pada masyarakat utamanya untuk menangani pemilih pemula maupun pemilih yang sudah berpengalaman, mulai dari mengenalkan peraturan, mempersiapkan, membimbing mereka dalam menggunakan hak pilih secara baik, mandiri dan bertanggung jawab.
2. Bagi partai politik dan organisasi masyarakat lainnya harus turun dan bekerjasama untuk memberikan pencerahan dalam bentuk informasi kepada masyarakat untuk lebih meningkatkan kesadaran politik masyarakat sehingga bermuara pada keikutsertaan dalam kegiatan pemilihan umum.

3. Bagi masyarakat dengan berbagai program yang dilaksanakan pemerintah, partai politik maupun organisasi masyarakat diharapkan untuk lebih antusias dalam mengikuti kegiatan yang di selenggarakan pemerintah ataupun partai politik agar dengan keantusias dan keikutsertaan masyarakat dapat meningkatkan kesadaran politik yang nantinya berdampak terhadap partisipasi politik .

DAFTAR PUSTAKA

- Almond, Gabriel dan Sidney Verba. 1984. *Budaya Politik (Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara)*. Jakarta : PT Bina Aksara.
- Budiardjo, Miriam. Edisi Revisi 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Huntington, Samuel P dan Nelson, Joan. 1994. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rnika Cipta.
- Hidayat, taufik. “Pengaruh Kesadaran Politik Dan Status Sosial Ekonomi Terhadap Partisipasi Politik Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2014 Kota Samarinda” *Jurnal Pemerintahan Integratif* (April, 2016) hal 568-569.
- Ruslan, Utsman Abdul Muis. 2000. *Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin*. Solo: Era Intermedia Sarwono.
- Rush, Michael & Althof. 2000. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sanit, Arbi. 2012. *Sistem Politik Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Siregar, Syofian. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Sudjana, Anas. 2001. *Pengantar Statistik Pendidikan*. Bumi Aksara:Jakarta